

**SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, Desember 2017
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat,

Triyono, S.P.,M.Si
NIP. 19740605 2000012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1 - 2
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 46
A. Penjelasan Umum	7 - 20
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21 - 27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27 - 37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37 - 42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42 - 45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45 - 48
VI. Lampiran dan Daftar	49 - 57

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
JL. TANGGULANGIN NO 3, SURABAYA
TELEPON 031 5673571, FAXIMILE 031 5673571

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Desember 2017
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat,

Triyono, S.P.,M.Si
NIP. 19740605 2000012 1 001

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp110.214.735,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp80.188.848.718,- atau mencapai 42,16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp190.201.226.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp83.194.605.604,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp76.331.192.964,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.991.580.318,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp30.937.500,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.889.123.121,- dan Rp81.464.587.661,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp130.341.831,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp67.915.389.608,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp67.785.047.777,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp115.079.258,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp67.669.968.519,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp3.484.871.694,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp67.669.968.519,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp436.465.553,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp146.086.150.039,-; Kenaikan/Penurunan ekuitas sebesar Rp77.979.715.967 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp81.464.587.661,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	110.214.735	#DIV/0!	146.933.219
JUMLAH PENDAPATAN		-	110.214.735	#DIV/0!	146.933.219
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.487.274.000	1.279.127.472	86,00	1.129.430.581
Belanja Barang	B.4	180.729.733.000	72.413.962.222	40,07	21.128.402.969
Belanja Modal	B.5	7.984.219.000	6.495.759.024	81,36	411.059.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	0.00
JUMLAH BELANJA		190.201.226.000	80.188.848.718	42,16	22.668.892.550

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	824.086.187	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	67.705.717.612	1.914.470.968
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	7.800.496.000	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	893.165	435.500
Persediaan yang belum diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		76.331.192.964	1.914.906.468
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	8.189.613.024	2.430.926.200
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	9.375.000	9.375.000
Aset Tetap Lainnya	C.19	1.040.428.929	352.407.929
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(2.247.836.635)	(1.252.990.955)
Jumlah Aset Tetap		6.991.580.318	1.539.718.174
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	49.500.000	49.500.000
Aset Lain-Lain	C.23	-	10.640.300
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.24	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(18.562.500)	(12.962.373)
Jumlah Aset Lainnya		30.937.500	47.177.927
JUMLAH ASET		83.353.710.782	3.501.802.569
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	824.086.187	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	988.518.259	16.930.875
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	76.518.675	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.889.123.121	16.930.875
JUMLAH KEWAJIBAN		1.889.123.121	16.930.875
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	81.464.587.661	3.484.871.694
JUMLAH EKUITAS		81.464.587.661	3.484.871.694
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83.353.710.782	3.501.802.569

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	130.341.831	41.616.219
JUMLAH PENDAPATAN		130.341.831	41.616.219
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.279.127.472	1.129.430.581
Beban Persediaan	D.3	60.277.688	57.128.550
Beban Barang dan Jasa	D.4	47.292.494.730	14.073.587.408
Beban Pemeliharaan	D.5	1.705.129.894	658.170.460
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16.528.189.850	5.989.582.342
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.050.169.974	418.876.756
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		67.915.389.608	22.326.776.097
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(67.785.047.777)	(22.285.159.878)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(10.154.333)	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		125.233.591	107.959.131
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		115.079.258	107.959.131
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(67.669.968.519)	(22.177.200.747)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(67.669.968.519)	(22.177.200.747)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	3.484.871.694	24.556.540.155
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(67.669.968.519)	(22.177.200.747)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(198.000)	48.737.865
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(436.267.553)	-
JUMLAH		(436.465.553)	48.737.865
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	146.086.150.039	1.056.794.421
EKUITAS AKHIR	E.5	81.464.587.661	3.484.871.694

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi JAWA TIMUR

*Dasar
Hukum dan
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh

- kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
- b) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pengawasan Pemilu;

- c) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui

apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/Aplikasi</i> Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.250.483.000	1.487.274.000
Belanja Barang	9.818.359.000	180.729.733.000
Belanja Modal	321.750.000	7.984.219.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	11.390.592.000	190.201.226.000

Realisasi

Pendapatan

Rp110.214.735

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp110.214.735. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Jasa Jasa Giro dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	110.214.735	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	110.214.735	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dari rekening Hibah Langsung Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah di setor ke Kas Negara sebagaimana bukti terlampir, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2017	2.362.924
2	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2017	2.568.204
3	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2017	1.381.615
4	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2017	846.198
5	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2017	503.444
6	Provinsi	42.759.412
7	Panwaslu Kota Blitar	43.207
8	Panwaslu Lamongan	67.408
9	Panwaslu Trenggalek	82.474
10	Panwaslu Ponorogo	113.958
11	Panwaslu	511.433
12	Panwaslu Tuban	31.293
13	Provinsi	47.716.750
14	Panwaslu Kota Blitar	189.675
15	Panwaslu Nganjuk	427.141
16	Panwaslu Bangkalan	362.269
17	Panwaslu	455.205
18	Panwaslu Kota Kediri	166.012
19	Panwaslu	629.844
20	Panwaslu Bondowoso	315.655
21	Panwaslu Jember	561.875
22	Panwaslu Sampang	272.358
23	Panwaslu	289.595
24	Panwaslu Lumajang	261.231
25	Panwaslu Gresik	240.478
26	Panwaslu Kota Malang	136.428
27	Panwaslu Kota Batu	151.218
28	Panwaslu Tuban	419.154
29	Panwaslu Kota Blitar	170.943
30	Panwaslu Pacitan	256.672
31	Panwaslu Kediri	141.034
32	Panwaslu Jember	330.333
33	Panwaslu	104.039
34	Panwaslu	401.617
35	Panwaslu Sumenep	461.596
36	Panwaslu Situbondo	376.585
37	Panwaslu Pasuruan	478.194
38	Panwaslu	439.017
39	Panwaslu Surabaya	560.425
40	Panwaslu Kota Blitar	185.731
41	Panwaslu Jombang	339.417
42	Panwaslu Pamekasan	337.823
43	Panwaslu Trenggalek	259.129
44	Panwaslu Bojonegoro	494.137
45	Panwaslu	439.918
46	Panwaslu Kota Mojokerto	116.462
47	Panwaslu Kab Malang	455.205
JUMLAH		110.214.735

Realisasi Pendapatan Jasa Per 31 Desember 2017 mengalami Penurunan 24,99 persen dibandingkan TA

2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Selain itu, Pendapatan Lain-lain Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengalami Penurunan sebesar 100 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja barang dan belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI 30 September T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	110.214.735	41.616.219	164,84
Pendapatan Lain-lain	-	105.317.000	-100,00
Jumlah	110.214.735	146.933.219	-24,99

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp.

80.188.848.718

Realisasi Belanja instansi pada Per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp80.188.848.718 atau 42,16 persen dari anggaran belanja sebesar Rp190.210.226.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2017

Uraian	Per 31 Desember TA 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.487.274.000	1.282.699.142	86,24
Belanja Barang	180.729.733.000	76.332.220.478	42,24
Belanja Modal	7.984.219.000	6.495.759.024	81,36
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	190.201.226.000	84.110.678.644	44,22
Pengembalian		(3.921.829.926)	-
Jumlah	190.201.226.000	80.188.848.718	42,16

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 253,74 Persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terdapat realisasi untuk tingkat kab/kota sampai desa/kelurahan di bawah provinsi Jawa Timur dari belanja barang hingga belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.279.127.472	1.129.430.581	13,25
Belanja Barang	72.413.962.222	21.128.402.969	242,73
Belanja Modal	6.495.759.024	411.059.000	1.480,25
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	80.188.848.718	22.668.892.550	253,74

*Belanja Pegawai
Rp1.279.127.472*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.279.127.472 dan Rp1.129.430.581. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Per 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 13,25 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA
2017 dan 2016*

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	393.412.173	239.889.870	64,00
Belanja Gaji dan tunjangan pejabat negara	506.706.300	364.647.000	38,96
Belanja Lembur	40.236.000	52.119.100	(22,80)
Belanja Tunjangan khusus&Belanja Pegawai Transito	342.344.669	472.775.286	(27,59)
Jumlah Belanja Kotor	1.282.699.142	1.129.431.256	13,57
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.571.670)	(675)	529,036
Jumlah Belanja	1.279.127.472	1.129.430.581	13,25

*Belanja
Barang Rp
72.413.962.222*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp72.413.962.222 dan Rp21.128.402.969. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan 242,73 dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh telah dilakukan realisasi belanja barang hingga tingkat kecamatan pada 38 kabupate/kota dan memperoleh anggaran pada masing-masing panwas kabupaten/kota yang mampu untuk merealisasikan belanja barang tersebut.

*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2017 dan
2016*

URAIAN	REALISASI Per 30 September TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	35.490.529.893	8.471.107.540	318,96
Belanja Barang Non Operasional	7.321.158.434	2.919.236.730	150,79
Belanja Jasa	15.164.689.212	3.104.466.297	388,48
Belanja Pemeliharaan	1.704.841.894	658.170.460	159,03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.651.001.045	5.990.932.342	177,94
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	76.332.220.478	21.143.913.369	261,01
Pengembalian Belanja	(3.918.258.256)	(15.510.400)	
Jumlah Belanja	72.413.962.222	21.128.402.969	242,73

Belanja Modal Rp
6.495.759.024

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.495.759.024,- dan Rp411.059.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2017 mengalami Kenaikan sebesar 1480,34% dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas berupa peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI Per 30 Desember 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.807.738.024	361.559.000	1506,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	569.289.000	-	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	118.732.000	49.500.000	139,86
Jumlah Belanja Kotor	6.495.759.024	411.059.000	1480,25
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6.495.759.024	411.059.000	1480,25

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.807.738.024,-, mengalami penurunan sebesar 1506,301 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp361.559.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan ruang kegiatan baru sentra gakkumdu yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas ruang.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Alat Bantu	33.481.800	0	100,00
Alat Kantor	1.168.511.400	24.260.500	4716,52
Alat Rumah Tangga	3.355.458.100	72.022.500	4558,90
Alat Studio	4.477.274	143.429.000	(96,88)
Alat Komunikasi	10.716.200	2.486.000	331,06
Komputer Unit	1.172.231.000	25.476.000	4501,31
Peralatan Komputer	62.862.250	93.885.000	(33,04)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	5.807.738.024	361.559.000	1506,30

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp824.086.187.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp824.086.187,- dan 0,- yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31/12/2017	31/12/2016
Panwaslu Banyuwangi	28.452.269	-
Panwaslu Jember	14.260.000	-
Panwaslu Kota Madiun	2.275.000	-
Panwaslu Lamongan	505.673.000	-
Panwaslu Lumajang	272.078.000	-
Panwaslu Madiun	100.000	-
Panwaslu Ponorogo	6.918	-
Bawaslu Provinsi	1.000	-
Panwaslu Situbondo	1.240.000	-
	824.086.187	-

Nilai di atas telah menjadi bukti setor yang penyetorannya dilakukan melewati tahun anggaran 2017 sejumlah Rp. 824.086.187,- (Sebagaimana Terlampir).

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp
67.705.717.612*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 67.705.717.612 dan Rp 1.914.470.968.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan Setara kas yaitu Sisa dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota dan Provinsi yang masih dipergunakan untuk mendukung operasional tahapan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tahun 2017. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

NO	Keterangan	TH 2017	TH 2016
1	Hibah Kab. Situbondo		119.392.297
2	Hibah Kota Batu		1.795.078.671
3	Provinsi Jawa Timur	39.817.425.100	
4	Kas Tunai Provinsi Jawa Timur	117.770	
5	Panwaslu Kab Bangkalan	2.527.594.564	
6	Panwaslu Kab Pamekasan	2.076.975.000	
7	Panwaslu Kota Kediri	326.446.906	
8	Panwaslu Kota Malang	2.401.563.000	
9	Panwaslu Kab Madiun	3.708.748.000	
10	Panwaslu Kota Mojokerto	239.803.629	
11	Panwaslu Kab Bojonegoro	2.756.649.500	
12	Panwaslu Kab Magetan	524.945.918	
13	Panwaslu Kota Madiun	813.799.000	
14	Panwaslu Kab Pasuruan	1.893.109.400	
15	Panwaslu Kab Tulungagung	183.365.055	
16	Panwaslu Kab Nganjuk	1.069.191.025	
17	Panwaslu Kab Jombang	2.332.784.000	
18	Panwaslu Kota Probolinggo	1.064.803.268	
19	Panwaslu Kab Probolinggo	2.556.447.957	
20	Panwaslu Kab Lumajang	714.099.898	
21	Panwaslu Kab Bondowoso	2.393.213.196	
22	Panwaslu Kab Sampang	84.755.055	
23	Jasa Giro Pilgub Tahun 2017	3.346.863	
24	Pajak Pilgub Tahun 2017	28.643.844	
25	Jasa Giro Pilkada Tahun 2017	15.619.968	
26	Pajak belum terbayar Pilkada 2017	9.605.236	
27	Jasa Giro Apbn Tahun 2017	1.160.265	
28	Pajak belum terbayar 2017	38.269.595	
29	Kas Tunai Panwas Kab/Kota	123.234.600	
Jumlah		67.705.717.612	1.914.470.968

Dari rincian diatas terdapat sisa dari kas hibah sebesar Rp. 67.546.612.434,-, Jasa Giro belum terbayar pada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 21.127.096,-, Pajak yang belum terbayar sebesar Rp. 76.518.675,-, Saldo kas tunai pada provinsi Rp. 117.770,- dan Saldo kas tunai pada Kabupaten/Kota Rp. 123.234.600,-.

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Dimuka

(Prepaid)

Rp

7.800.496.000

Belanja dibayar dimuka adalah terkait belanja sewa yang mana telah dilakukan pembayaran penuh sebelum mendapatkan fasilitasnya pada tahun anggaran 2017.

Belanja Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017.

NO	NAMA SEWA	JANGKA WAKTU DIBAYAR DIMUKA	SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DES 2017
A	B	D	E
1	Sewa gedung Kantor Kota Probolinggo	11 Bulan dari 12 Bulan	66.000.000
2	Sewa gedung Kantor Kab. Lamongan	11 Bulan dari 12 Bulan	66.000.000
3	Sewa gedung Kantor Kab. Sampang	11 Bulan dari 12 Bulan	66.000.000
4	Sewa gedung Kantor Kab. Gresik	11 Bulan dari 12 Bulan	66.000.000
5	Sewa gedung Kantor Kab. Mojokerto	11 Bulan dari 12 Bulan	66.000.000
6	Sewa Mobil Panwas Kab/Kota Perpanjangan	11 Bulan dari 12 Bulan	7.470.496.000
TOTAL			7.800.496.000

C.10 Persediaan

Persediaan

Rp893.165,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan Tahun 2016 masing-masing adalah sebesar Rp893.165,- dan Rp435.500,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	893.165	435.500
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	893.165	435.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin **C.16 Peralatan dan Mesin**

Mesin

Rp 8.189.613.024

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 8.189.613.024,- dan Rp2.430.926.200,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	2.430.926.200
Mutasi tambah:	
Pembelian	5.808.123.024
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	10.640.300
Mutasi kurang:	
Penghentian penggunaan (Usulan Rusak Berat ke Pengelola)	(60.076.500)
Koreksi Pencatatan	(396.000)
Saldo per 31 Desember 2017	8.189.613.024
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(2.240.336.635)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	5.949.276.389

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin terdiri atas pembelian senilai Rp5.808.123.024,- dan penggunaan kembali atas aset yang dihentikan penggunaannya senilai Rp10.640.300,-.

Aset yang digunakan kembali merupakan aset yang akan diusulkan penghapusannya akan tetapi belum dilakukan perubahan ke dalam kondisi rusak berat.

Mutasi kurang terdiri atas usulan barang rusak berat ke Pengelola senilai Rp60.076.500,- termasuk di dalamnya aset yang digunakan kembali (akan tetapi belum dilakukan perubahan kondisi) dan dilakukan perubahan ke dalam kondisi rusak berat untuk diusulkan penghapusannya. Selain itu terdapat Koreksi Pencatatan pada BMN Adaptor Pa-Fa senilai Rp396.000,- yang selanjutnya dikapitalisasi ke dalam nilai BMN Pesawat Telephone.

Jalan, Jaringan dan Irigasi **C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

dan Irigasi Rp

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 9.375.000

9.375.000

dan Rp 9.375.000. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2016	9,375,000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2017	9,375,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2017	(6,562,500)
Nilai Buku per 30 September 2017	2,812,500

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap**Lainnya Rp*

1.040.428.929

C.19 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp1.040.428.929 dan Rp352.407.929,-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	352.407.929
Mutasi tambah:	
Pembelian	688.021.000
Saldo per 31 Desember 2017	1.040.428.929

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap.

Dalam hal ini aset tetap lainnya yang dimaksud adalah renovasi kantor. Dari perubahan nilai tersebut, terdapat tambahan sebanyak tujuh renovasi dengan total nilai Rp688.021.000,-.

*Akumulasi**Penyusutan**Aset Tetap Rp*

2.247.836.635

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp2.247.836.635 dan Rp1.259.765.828.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31
Desember 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8,189,613,024	2,240,336,635	5,949,276,389
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,375,000	7,500,000	1,875,000
Akumulasi Penyusutan		8,198,988,024	2,247,836,635	5,951,151,389

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp
49.500.000*

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp49.500.000 dan Rp 49.500.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 2016	49.500.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2017	49.500.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(18.562.500)
Nilai Buku per 30 September 2017	30.937.500

Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Per 31 Desember 2017

Uraian	Nilai Perolehan
Website Bawaslu Prov Jatim	49.500.000
Jumlah	49.500.000

Aset Lain-lain

Rp. 0

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp0,- dan Rp10.640.300,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	10,640,300
Mutasi tambah:	
- penghentian dari penggunaan	60,076,500
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(10,640,300)
- usulan barang Rusak Berat ke Pengelola	(60,076,500)
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

Rp 18.562.500

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp18.562.500 dan Rp12.962.373. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2017 sebesar Rp.5.600.127 yang merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2017

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	49.500.000	18.562.500	30.937.500
Jumlah	49.500.000	18.562.500	30.937.500
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	49.500.000	18.562.500	30.937.500

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp
824.086.187*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp824.086.187 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan	31/12/2017	31/12/2016
Panwaslu Banyuwangi	28.452.269	-
Panwaslu Jember	14.260.000	
Panwaslu Kota Madiun	2.275.000	-
Panwaslu Lamongan	505.673.000	-
Panwaslu Lumajang	272.078.000	
Panwaslu Madiun	100.000	
Panwaslu Ponorogo	6.918	
Bawaslu Provinsi	1.000	
Panwaslu Situbondo	1.240.000	
	824.086.187	-

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 988.518.259

C.27 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp988.518.259 dan Rp16.930.875. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16
Pembayaran Listrik bulan desember 2016		9.004.998
Pembayaran Air bulan desember 2016		507.840
Pembayaran Telpon bulan desember 2016		1.417.037
Pembayaran Internet bulan desember 2016		6.001.000
Tunggakan atas belanja keperluan perkantoran	794.408.000	
Tunggakan atas belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5.610.000	
Tunggakan atas belanja Bahan	34.237.000	
Tunggakan atas belanja Sewa	1.500.000	
Tunggakan atas belanja Jasa Profesi	400.000	
Tunggakan atas belanja Jasa Lainnya	8.700.000	
Tunggakan atas belanja Perjalanan biasa	94.598.259	
Tunggakan atas belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	49.065.000	
Total	988.518.259	16.930.875

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 76.518.675

C.28 Utang Jangka Pendek lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp76.518.675,- dan Rp. 0,-. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017

Uraian	31-Des-17
Pajak Belum di setor atas dana Pilgub 2017 Kab Lamongan	14.425.400
Pajak Belum di setor atas dana Pilgub 2017 Kab Blitar	14.218.444
Pajak Belum di setor atas dana Pilkada 2017 Kab Magetan	49.600
Pajak Belum di setor atas dana Pilkada 2017 Kab Pamekasan	1.192.000
Pajak Belum di setor atas dana Pilkada 2017 Kota Mojokerto	8.363.636
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kota Mojokerto	855.000
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kab Lumajang	3.226.000
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kota Malang	5.257.100
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kota Madiun	1.185.000
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kab Blitar	8.819.250
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kab Ponorogo	5.566.600
Pajak Belum di setor atas dana APBN 2017 Kab Pasuruan	13.360.645
Total	76.518.675

*Ekuitas**Rp 81.464.587.661***C. 31 Ekuitas**

Ekuitas Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 81.464.587.661 dan Rp3.484.871.694. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16
Ekuitas	81.342.897.078	3.484.871.694
Total	81.342.897.078	3.484.871.694

*Pendapatan
PNBP**Rp130.341.831***D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp130.341.831 dan Rp41.616.219. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31
Desember 2017 dan 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	130.341.831	41.616.219	213,20
Pendapatan Lain-lain		-	#DIV/0!
Jumlah	130.341.831	41.616.219	213,20

Pendapatan Jasa berasal dari Jasa Giro tahun 2017 yang telah dibayar, Jasa Giro tahun 2017 yang belum terbayar di tahun 2017 pada Panwaslu Kab/Kota.

Beban

*Pegawai Rp
1.279.127.472*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.279.127.472 dan Rp1.129.430.581. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	31-Des-17	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	393.412.173	239.889.870	64,00
Belanja Gaji dan tunjangan pejabat negara	506.706.300	364.647.000	38,96
Belanja Lembur	40.236.000	52.119.100	(22,80)
Belanja Tunjangan khusus&Belanja Pegawai Transit	342.344.669	472.775.286	(27,59)
Jumlah Belanja Kotor	1.282.699.142	1.129.431.256	13,57
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.571.670)	(675)	529.036,30
Jumlah Belanja	1.279.127.472	1.129.430.581	13,25

Beban

*Persediaan Rp
60.277.688*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp60.277.688 dan Rp57.128.550. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	60.277.688	57.128.550	5,51
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	60.277.688	57.128.550	5,51

Beban Barang dan Jasa Rp 47.292.494.730

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp47.292.494.730 dan Rp14.073.587.408. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 233,78% terjadi karena telah terlaksananya anggaran 38 Panwas Kab/kota se-Jawa Timur dan adanya tunggakan beberapa kabupaten/kota sebesar Rp. 527.853.000,-. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	36.231.020.761	8.416.452.221	330,48
Beban Langganan Daya dan Jasa	355.972.873	249.617.856	42,61
Beban Jasa Pos dan Giro	5.609.030	3.781.780	48,32
Beban sewa	4.699.533.828	1.951.536.300	140,81
Beban Jasa Konsultan		27.000.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	1.709.025.000	312.580.000	446,75
Beban Jasa Lainnya	587.721.606	226.052.921	159,99
Beban bahan	6.638.095.434	2.391.301.730	177,59
Beban honor output kegiatan	717.300.000	509.425.000	40,81
jumlah beban barang dan jasa	50.944.278.532	14.087.747.808	261,62
pengembalian beban	3.651.783.802	14.160.400	25688,71
Jumlah	47.292.494.730	14.073.587.408	236,04

Beban

Pemeliharaan

Rp

1.705.129.894

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.705.129.894 dan Rp658.170.460. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan sebesar 159,07% terjadi karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin dan 38 Panwas Kab/kota se-Jawa Timur gedung yang saat ini digunakan merupakan fasilitas pemda/pemkot yang mana sebagian pemeliharaan masuk pada anggaran pemda/pemkot. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.278.959.621	101.187.000	1163,96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.882.273	551.083.339	(22,72)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	5.900.121	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	288.000	-	#DIV/0!
Jumlah	1.705.129.894	658.170.460	159,07

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
16.528.169.974*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.528.169.974 dan Rp5.989.582.342. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas sebesar 175,95% terjadi karena adanya realisasi anggaran 38 Panwas Kab/kota se-Jawa Timur dan adanya tunggakan pada panwaslu kab/kota sebesar Rp. 143.663.259,-. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.388.103.824	3.654.006.142	20,09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.028.045.000	100.650.000	2908,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.603.590.450	2.093.596.000	263,18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.774.925.030	141.330.200	1155,87
Jumlah beban perjalanan dinas	16.794.664.304	5.989.582.342	180,40
pengembalian beban perjalanan dinas	266.474.454		#DIV/0!
Jumlah	16.528.189.850	5.989.582.342	175,95

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
1.050.169.974*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.050.169.974 dan Rp418.876.756. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.032.019.360	409.739.543	60,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1.875.000	1.875.000	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.900.614	1.074.713	72,45
Jumlah Penyusutan	1.037.794.974	412.689.256	60,23
			-
Beban Amortisasi Software	12.375.000	6.187.500	50,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	12.375.000	6.187.500	50,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.050.169.974	418.876.756	60,11

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp
115.079.258*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2017
dan 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	282.000	(100,00)
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	123.352.370	105.035.000	17,44
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	2.016.296	2.794.131	(27,84)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(135.075)	(152.000)	(11,13)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(10.154.333)	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	115.079.258	107.959.131	6,60

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp 3.484.871.694

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp3.484.871.694 dan Rp24.556.540.155.

Defisit LO

Rp

67.669.968.519

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp67.669.968.519 dan Rp22.177.200.747. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp436.465.553

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp436.465.553 dan Rp48.737.865. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai dan juga berasal dari koreksi akun SP4HL pada pengesahan pengembalian belanja hibah Panwaslu Kota Batu.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2017 dan 2016

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	198.000
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	198.000

Rincian Koreksi Lain-lain 31 Desember 2017 dan 2016

Koreksi Lain-Lain	Nilai Koreksi
No SP3HL 170310500280003 / SPM 00174	436.267.553
Jumlah	436.267.553

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas Rp

146.086.150.039

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp146.086.150.039 dan Rp1.056.794.421. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	110.214.735
Ditagihkan ke Entitas Lain	(56.750.062.671)
Pengesahan Hibah Langsung	(89.565.694.400)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	119.392.297
Jumlah	(146.086.150.039)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp110.214.735 sedangkan DKEL sebesar Rp56.750.062.671,-

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp22.079.974.929,- dari total Rp89.565.694.400,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp119.392.297.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	PEMBERI HIBAH	Bentuk Hibah	Diterima	Realisasi (SP2HL)	Sisa (SP4HL)	Sisa
1	Pemprov Jawa Timur	Uang	51.401.734.000	11.584.308.900		39.817.425.100
2	Pemkab Bangkalan	Uang	4.800.000.000	2.272.405.436		2.527.594.564
3	Pemkab Pamekasan	Uang	2.650.000.000	573.025.000		2.076.975.000
4	Pemkot Kediri	Uang	952.486.500	626.039.594		326.446.906
5	Pemkot Malang	Uang	2.499.965.000	98.402.000		2.401.563.000
6	Pemkab Madiun	Uang	4.000.000.000	291.252.000		3.708.748.000
7	Pemkot Mojokerto	Uang	574.965.000	335.161.371		239.803.629
8	Pemkab Bojonegoro	Uang	3.366.649.500	610.000.000		2.756.649.500
9	Pemkab Magetan	Uang	1.000.000.000	475.054.082		524.945.918
10	Pemkot Madiun	Uang	1.171.149.000	357.350.000		813.799.000
11	Pemkab Pasuruan	Uang	3.462.760.000	1.569.650.600		1.893.109.400
12	Pemkab Tulungagung	Uang	496.209.000	312.843.945		183.365.055
13	Pemkab Nganjuk	Uang	1.599.965.000	530.773.975		1.069.191.025
14	Pemkab Jombang	Uang	2.566.871.400	234.087.400		2.332.784.000
15	Pemkot Probolinggo	Uang	1.283.338.000	218.534.732		1.064.803.268
16	Pemkab Probolinggo	Uang	3.339.602.000	783.154.043		2.556.447.957
17	Pemkab Lumajang	Uang	1.100.000.000	385.900.102		714.099.898
18	Pemkab Bondowoso	Uang	3.000.000.000	606.786.804		2.393.213.196
19	Pemkab Sampang	Uang	300.000.000	215.244.945		84.755.055
20	Pemkab Situbondo	Uang	119.392.297	-	119.392.297	-
Jumlah			89.685.086.697	22.079.974.929	119.392.297	67.485.719.471

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp 81.464.587.661

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp81.464.587.661 dan Rp3.484.871.694.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0126/ K.BAWASLU/ KU.01.00/ V/ 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI

Nomor: 1275 - KEP TAHUN 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 23 Mei 2016, Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 36/ K.BAWASLU/ KU.01.00/ V/ 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 11/ SK/ BAWASLU-PROV/ JTM/ I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen pada tanggal 1 Mei 2016, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Triza Novia, S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen	: Abdul Kohar, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 53/ BAWASLU-PROV.JI/ KU.01.00/ XI/ 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen

pada tanggal 10 November 2016, dan Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 54/BAWASLU-PROV.JI / KU.01.00 / XI / 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan SPM pada tanggal 10 November 2016 Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anditya S M, S.Si
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Arif Priyono, S.E
Bendahara	: Reny Trijayanti

- Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0639/ K.BAWASLU/ KU.01.00/ XI/ 2017 Tentang Perubahan kesembilan lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0372/ K.BAWASLU/ KU.01.00/XII/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, telah dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anditya S M, S.Si
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Arif Priyono, S.E
Bendahara	: Reny Trijayanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Triyono, SP.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anditya S M, S.Si
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Pitut Fariana
Bendahara	: Reny Trijayanti

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Tot. Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		s.d 31 Des 2017	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2017
A	Tanah						
1	Tanah		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
	Alat Berat		40,411,800	2,475,000	3,381,557	5,856,557	34,555,243
1	Alat Angkutan Darat Bermotor		1,070,480,000	593,637,850	147,764,288	741,402,138	329,077,862
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		5,077,355,200	260,930,895	563,564,080	803,481,675	4,273,873,525
	Alat Studio dan Komunikasi		206,717,774	44,881,210	39,974,027	79,744,857	126,972,917
	Alat Kepolisian		0	247,500	0	247,500	(247,500)
5	Komputer Unit		1,510,774,000	245,246,124	216,743,627	450,549,751	1,060,224,249
6	Peralatan Komputer		283,874,250	99,947,376	60,591,781	159,054,157	124,820,093
	Jumlah		8,189,613,024	1,247,365,955	1,032,019,360	2,240,336,635	5,949,276,389
D	Jaringan						
1	Instalasi Lain		9,375,000	5,625,000	1,875,000	7,500,000	1,875,000
	Jumlah		9,375,000	5,625,000	1,875,000	7,500,000	1,875,000
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
G	Aset Lainnya						
1	Aset tak Berwujud*		49,500,000	6,187,500	12,375,000	18,562,500	30,937,500
2	Aset Tetap yang tidak digunakan		0	6,774,873	3,900,614	-	-
	Jumlah		49,500,000	12,962,373	16,275,614	18,562,500	30,937,500

* Beban Amortisasi

LAMPIRAN II

**38 KABUPATEN/KOTA
APBN
PERIODE DESEMBER 2017**

Lampiran III: Laporan Saiba dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN Surabaya I

NO	Laporan SAIBA	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Lra		
2	Neraca		
3	Lo		
4	Lo Detail		
5	Lpe		
6	Lpe Detail		
7	Laporan Kinerja		
8	Laporan Realisasi Anggaran Belanja		
9	Laporan Realisasi Pengembalian Belanja		
10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah		
11	Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah		
12	Rekening Koran Provinsi		
13	Memo Jurnal Penyesuaian		
14	Kertas Kerja Telaah LK		
15	Bukti Setor TUP 2018		
16	BAR REKONSILIASI bulan Desember 2017		

Lampiran IV: Daftar SPHL dan SP3HL Hibah Tahun 2017

NO	PEMBERI HIBAH	Bentuk Hibah	Diterima	Realisasi (SP2HL)	Sisa (SP4HL)/Setoran Ke Kas Negara	Sisa
1	Pemprov Jawa Timur	Uang	51.401.734.000	11.584.308.900		39.817.425.100
2	Pemkab Bangkalan	Uang	4.800.000.000	2.272.405.436		2.527.594.564
3	Pemkab Pamekasan	Uang	2.650.000.000	573.025.000		2.076.975.000
4	Pemkot Kediri	Uang	952.486.500	626.039.594		326.446.906
5	Pemkot Malang	Uang	2.499.965.000	98.402.000		2.401.563.000
6	Pemkab Madiun	Uang	4.000.000.000	291.252.000		3.708.748.000
7	Pemkot Mojokerto	Uang	574.965.000	335.161.371		239.803.629
8	Pemkab Bojonegoro	Uang	3.366.649.500	610.000.000		2.756.649.500
9	Pemkab Magetan	Uang	1.000.000.000	475.054.082		524.945.918
10	Pemkot Madiun	Uang	1.171.149.000	357.350.000		813.799.000
11	Pemkab Pasuruan	Uang	3.462.760.000	1.569.650.600		1.893.109.400
12	Pemkab Tulungagung	Uang	496.209.000	312.843.945		183.365.055
13	Pemkab Nganjuk	Uang	1.599.965.000	530.773.975		1.069.191.025
14	Pemkab Jombang	Uang	2.566.871.400	234.087.400		2.332.784.000
15	Pemkot Probolinggo	Uang	1.283.338.000	218.534.732		1.064.803.268
16	Pemkab Probolinggo	Uang	3.339.602.000	783.154.043		2.556.447.957
17	Pemkab Lumajang	Uang	1.100.000.000	385.900.102		714.099.898
18	Pemkab Bondowoso	Uang	3.000.000.000	606.786.804		2.393.213.196
19	Pemkab Sampang	Uang	300.000.000	215.244.945		84.755.055
20	Pemkab Situbondo	Uang	119.392.297	-	119.392.297	-
21	Pemkota Batu	Uang	1.795.078.671	1.358.811.118	436.267.553	-
Jumlah			91.480.165.368	23.438.786.047	555.659.850	67.485.719.471

Lampiran V: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
31 Desember 2017

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Pemerintah Kota Batu	Uang	DN	Rp 1.795.078.671	Rp 1.795.078.671	Rp -	
2	Pemerintah Situbondo	Uang	DN	Rp 119.392.297	Rp 119.392.297	Rp -	
1	Pemprov Jawa Timur	Uang	DN	Rp 51.401.734.000	Rp 11.584.308.900	Rp 39.817.425.100	
2	Pemkab Bangkalan	Uang	DN	Rp 4.800.000.000	Rp 2.272.405.436	Rp 2.527.594.564	
3	Pemkab Pamekasan	Uang	DN	Rp 2.650.000.000	Rp 573.025.000	Rp 2.076.975.000	
4	Pemkot Kediri	Uang	DN	Rp 952.486.500	Rp 626.039.594	Rp 326.446.906	
5	Pemkot Malang	Uang	DN	Rp 2.499.965.000	Rp 98.402.000	Rp 2.401.563.000	
6	Pemkab Madiun	Uang	DN	Rp 4.000.000.000	Rp 291.252.000	Rp 3.708.748.000	
7	Pemkot Mojokerto	Uang	DN	Rp 574.965.000	Rp 335.161.371	Rp 239.803.629	
8	Pemkab Bojonegoro	Uang	DN	Rp 3.366.649.500	Rp 610.000.000	Rp 2.756.649.500	
9	Pemkab Magetan	Uang	DN	Rp 1.000.000.000	Rp 475.054.082	Rp 524.945.918	
10	Pemkot Madiun	Uang	DN	Rp 1.171.149.000	Rp 357.350.000	Rp 813.799.000	
11	Pemkab Pasuruan	Uang	DN	Rp 3.462.760.000	Rp 1.569.650.600	Rp 1.893.109.400	
12	Pemkab Tulungagung	Uang	DN	Rp 496.209.000	Rp 312.843.945	Rp 183.365.055	
13	Pemkab Nganjuk	Uang	DN	Rp 1.599.965.000	Rp 530.773.975	Rp 1.069.191.025	
14	Pemkab Jombang	Uang	DN	Rp 2.566.871.400	Rp 234.087.400	Rp 2.332.784.000	
15	Pemkot Probolinggo	Uang	DN	Rp 1.283.338.000	Rp 218.534.732	Rp 1.064.803.268	
16	Pemkab Probolinggo	Uang	DN	Rp 3.339.602.000	Rp 783.154.043	Rp 2.556.447.957	
17	Pemkab Lumajang	Uang	DN	Rp 1.100.000.000	Rp 385.900.102	Rp 714.099.898	
18	Pemkab Bondowoso	Uang	DN	Rp 3.000.000.000	Rp 606.786.804	Rp 2.393.213.196	
19	Pemkab Sampang	Uang	DN	Rp 300.000.000	Rp 215.244.945	Rp 84.755.055	
Jumlah				Rp 91.480.165.368	Rp 23.994.445.897	Rp 67.485.719.471	

Lampiran VI: Daftar Tunggakan Kabupaten/Kota

NO	Daerah	Akun	NOMINAL
1	KOTA BLITAR	521211	1.797.000
		522191	1.200.000
		524111	15.503.159
2	KAB GRESIK	522141	1.500.000
		524114	5.760.000
3	KAB MADIUN	521211	2.430.000
		524114	5.000.000
		524111	11.250.000
4	KAB MAGETAN	524111	3.065.000
5	KOTA MALANG	521211	30.010.000
		522191	7.500.000
		522151	400.000
		524114	38.305.000
		524111	62.458.600
7	KAB SAMPANG	521111	187.452.000
8	KAB SITUBONDO	521111	45.202.000
		521115	5.610.000
9	KAB TULUNGAGUNG	521111	244.752.000
10	KAB JOMBANG	521111	317.002.000
11	KOTA PROBOLINGGO	524111	2.321.500
JUMLAH			988.518.259

LAMPIRAN VII
DAFTAR RINCIAN JASA GIRO DAN PAJAK YANG BELUM TERBAYAR TAHUN
2017

ATAS DANA PEMILIHAN GUBERNUR

RINCIAN JASA GIRO PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA PILGUB

NO	PANWASLU	NOMINAL JASA GIRO
1	Kab Lamongan	79.662
2	Kab Ngawi	630.000
3	Kota Blitar	43.207
4	Kab Mojokerto	161.125
5	Kab Tuban	31.293
6	Kab Situbondo	1.171.915
7	Kota Surabaya	39.229
8	Kab Trenggalek	331.034
9	Kab Kediri	447.829
10	Kab Malang	411.569
JUMLAH		3.346.863

RINCIAN PAJAK PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA PILGUB

NO	PANWASLU	NOMINAL PAJAK
1	Kab Lamongan	14.425.400
2	Kab Blitar	14.218.444
JUMLAH		28.643.844

LAMPIRAN VIII
DAFTAR RINCIAN JASA GIRO DAN PAJAK YANG BELUM TERBAYAR TAHUN
2017

ATAS DANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

RINCIAN JASA GIRO PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA PILKADA

NO	PANWASLU	NOMINAL JASA GIRO
1	Kab. Bangkalan	6.621.730
2	Kab. Bojonegoro	1.998.845
3	Kab. Jombang	1.334.851
4	Kab. Lumajang	176.438
5	Kab. Nganjuk	451.471
6	Kab. Probolinggo	4.761.028
7	Kab. Sampang	89.874
8	Kota Madiun	185.731
JUMLAH		15.619.968

RINCIAN PAJAK PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA PILKADA

NO	PANWASLU	NOMINAL PAJAK
1	Kab. Magetan	49.600
2	Kab. Pamekasan	1.192.000
3	Kota Mojokerto	8.363.636
JUMLAH		9.605.236

LAMPIRAN IX
DAFTAR RINCIAN JASA GIRO DAN PAJAK YANG BELUM TERBAYAR TAHUN
2017
ATAS DANA APBN

RINCIAN JASA GIRO PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA APBN

NO	PANWASLU	NOMINAL JASA GIRO	KET
1	Kab. Lamongan	337.323	Telah disetor
2	Kab. Tulungagung	271.988	Telah disetor
3	Kab. Probolinggo	452.441	Telah disetor
4	Kota Probolinggo	71.513	Telah disetor
5	Kota madiun	27.000	Konfirmasi
JUMLAH		1.160.265	-

RINCIAN PAJAK PANWASLU KAB/KOTA
BELUM TERBAYAR DI TAHUN 2017
ATAS DANA APBN

NO	PANWASLU	NOMINAL PAJAK	KET
1	Kota Mojokerto	855.000	Konfirmasi
2	Kab Lumajang	3.226.000	Konfirmasi
3	Kota Malang	5.257.100	Konfirmasi
4	Kota Madiun	1.185.000	Konfirmasi
5	Kab Blitar	8.819.250	Konfirmasi
6	Kab Ponorogo	5.566.600	Konfirmasi
7	Kab Pasuruan	13.360.645	Konfirmasi
JUMLAH		38.269.595	-

RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PANWASLU KAB/KOTA DI TAHUN 2017
ATAS DANA APBN

NO	PANWASLU	NOMINAL	KET
1	Kab. Jember	19.220.000	Konfirmasi
2	Kab. Lamongan	11.194.600	Telah disetor
3	Kab. Lumajang	92.820.000	Telah disetor
JUMLAH		123.234.600	-

(Bukti Setor Terlampir)